

**PERSEPSI DEKAN FKIP UNIVERSITAS LABUHANBATU DALAM MENJALANKAN
KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN
(STUDI: PELAKSANAAN KURIKULUM *OUTCOMES BASED EDUCATION* (OBE))**

**PERCEPTION OF THE CHIEF FKIP LABUHANBATU UNIVERSITY IN IMPLEMENTING
POLICIES OF THE MINISTER EDUCATION
(STUDY: IMPLEMENTING *OUTCOMES BASED EDUCATION* (OBE) CURRICULUM)**

AGUS ANJAR¹, ILHAM HAKIKI HARAHA², MEISA FITRI NASUTION³, SITI LAM'AH NASUTION⁴

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Labuhanbatu

²Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Labuhanbatu

^{3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja No. 126A, KM, 3,5 Aek Tapa Rantauprapat

email: ¹agusanjartiga@gmail.com, ²ilhambilogi90@gmail.com, ³meisa.fitri@gmail.com, ⁴sitinasution81@gmail.com

Abstrak

Dalam Penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui persepsi Dekan FKIP Universitas Labuhanbatu atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah oleh Menteri Pendidikan tentang kurikulum *Outcomes Based Education* (OBE) yang ditujukan untuk Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat luas, sehingga klimaks dari kurikulum ini adalah materi yang disuguhkan kepada mahasiswa memang benar-benar yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan tidak bersamaan dengan pelatihan dan sosialisasi yang matang sehingga akan sulit dijalankan bagi Dekan guna menginstruksikan kepada Ketua Program Studi yang ada. Atas dasar inilah peneliti menjadikan Dekan sebagai subjek dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan merujuk teori *key informan* sebagai pemberi informasi tunggal. Maka untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan sumber data berupa data primer yaitu dekan, dan data sekunder berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlunya pengiringan berupa sosialisasi dan pelatihan baik secara langsung maupun secara daring, agar perguruan tinggi yang ada didaerah dapat segera mengimplementasikan atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia.

Kata Kunci : *Persepsi, Kurikulum, OBE*

Abstract

In this study, the authors aimed to find out the perceptions of the chief FKIP Labuhanbatu University, regarding the issuance of a policy by the government, in this case the Minister of Education regarding the *Outcomes Based Education* (OBE) curriculum for Higher Education. The purpose of issuing this policy is to answer the needs that are really needed by the wider community, so that the climax of this curriculum is, the material that is presented to students is really what is needed by the community. The formulation of the problem in this study is why the policies issued by the Minister of Education are not accompanied by proper training and socialization so that it will be difficult for the Dean to instruct the Head of the existing Study Program. It is on this basis that the researcher makes the Dean the subject by using a qualitative descriptive approach by referring to the key informant theory as the sole provider of information. So to answer the problem researchers used data sources in the form of primary data in this case the dean, and secondary data in the form of interviews, documentation and observations. From the results of the research, it was concluded that accompaniment was needed in the form of socialization and training both directly and online, so that universities in the regions could immediately implement the policies issued by the Minister of Education of Indonesia.

Key Words : *Perception, Curriculum, OBE*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan baru meter penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara luas. Atas dasar meningkatkan kualitas masyarakat secara menyeluruh berbagai kebijakan di lingkup Pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat daerah saling memusatkan perhatian guna menselaraskan satu visi yakni menciptakan generasi yang handal yang siap bersaing dan saip pakai ditengah-tengah masyarakat nantinya.

Diantara kebijakan guna meningkatkan kualitas dan mutu masyarakat, yakni melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara memajukan sebuah bangsa seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela “untuk merubah dunia adalah melalui jalur pendidikan.

Atas dasar tersebut, dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi sering disuguhkan hal-hal baru berupa kebijakan melalui kurikulum yang harus dijalankan baik kampus Negeri maupun swasta. Berkaca dari hal tersebut, Dekan selaku pucuk pimpinan di lingkup Fakultas harus siaga untuk menjalankan yang telah diamanahkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Menteri Pendidikan.

Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya kebijakan Menteri Pendidikan berupa kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) segera dijalankan. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu, sangat antusias dalam menerapkan apa yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, akan tetapi terdapat berbagai hambatan berupa kurangnya pelatihan tentang penerapan OBE tersebut. Akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan tersebut menyebabkan, kebijakan tentang kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) belum optimal dijalankan oleh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas.

Kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) yang menekan akan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat tentunya sangat baik, sehingga pimpinan yang ada di Fakultas nantinya dapat memberikan arah dan masukkan kepada pimpinan yang ada dibawahnya berupa Ketua Program Studi. Untuk menerapkan tentang kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) tersebut menjadi catatan tersendiri bagi pimpinan yang ada di lingkungan Universitas Labuhanbatu, disebabkan pelatihan dan sosialisasi dari pakar yang benar-benar ahli dibidang tersebut belum terlaksana.

Atas dasar pandangan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam sebuah penelitian terhadap kebijakan Menteri Pendidikan tentang kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) apakah sudah benar-benar sudah dapat diterapkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu, dengan judul “Persepsi Dekan FKIP Universitas Labuhanbatu dalam Menjalankan Kebijakan Menteri Pendidikan dengan Studi: Pelaksanaan Kurikulum *Outcomes Based Education* (OBE)”.

Metode Penelitian

Penelitian tentang kebijakan publik ini, penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif agar mempermudah dalam menjalankan penelitian nantinya. Untuk mendapatkan sebuah data atau informasi tentang permasalahan yang diangkat maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang nantinya akan melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada subjek penelitian.

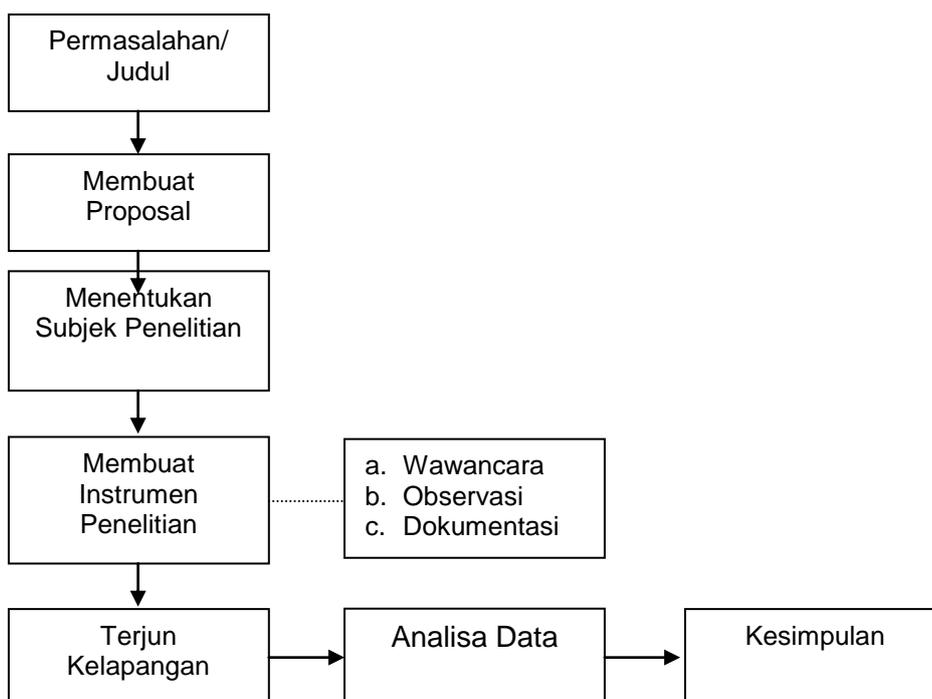
Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dan data skunder. Data primer merupakan sumber utama guna mendapatkan jawaban langsung dari key informan. Maka peneliti memilih data primer ini adalah Dekan FKIP Universitas Labuhanbatu yang dianggap mengetahui terhadap

permasalahan yang peneliti angkat maka dijadikan sebagai *key informan*. Sedangkan untuk data skunder peneliti akan melakukan pendekatan dengan mengumpulkan berupa dokumen atau dokumen lain yang peneliti anggap mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang peneliti angkat [1].

Adapun instrumen dalam penelitian guna menjawab permasalahan, dengan tehnik wawancara terbuka dan observasi dengan harapan dapat menggali informasi lebih mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian yang diangkat yakni tentang persepsi Dekan FKIP terhadap kebijakan Menteri Pendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis *Outcomes Based Education (OBE)* tersebut[2].

Guna mempermudah dalam proses penelitian dilapangan nantinya, penulis menggunakan konsep operasional agar mempermudah dan terarah ketika mencari informasi tersebut. Adapun konsep operasional dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Konsep Operasional Penelitian



Hasil Penelitian

Guna mempermudah untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang peneliti angkat, peneliti melakukan kunjungan atau terjun kelapangan dengan mealukan interview ataupun wawancara kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah Dekan FKIP Labuhanbatu. Disamping wawancara peneliti juga melakukan observasi dan mengamati dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi valid apakah gagasan yang sudah dibuat oleh lembaga resmi benar-benar sudah dijalankan.

Dari hasil wawancara didapat informasi bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu masih mempelajari tentang kebijakan kurikulum *Outcomes Based Education (OBE)*. Hal tersebut

menambah kredit point bahwa FKIP Labuhanbatu selalu turut andil setiap kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah dan menjadi nilai tersendiri di mata masyarakat. Dari kunjungan peneliti juga mendapatkan dosen-dosen yang berada di lingkungan FKIP Labuhanbatu sebagian besar belum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini didasari atas belum adanya sosialisasi dan pelatihan kemana arah dan tujuan diberlakukannya kurikulum yang baru tersebut. Sehingga wajar jika sebagian besar tenaga pendidik belum menuangkan narasinya kedalam RPS dan silabus.

Untuk memperkuat data yang didapat sebelumnya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap struktural di lingkungan FKIP Labuhanbatu. Hasilnya belum adanya narasi yang tertuang dalam Rencana Program Studi (RPS) setiap individu dosen. Namun demikian niat kuat dari struktural untuk menerapkan kurikulum OBE tersebut yang sudah diamanahi oleh kementerian pendidikan.

Dari sini dapat ditarik benang merahnya bahwa, sangat diharapkan sosialisasi yang serius dari pengambil kebijakan di lingkup pemerintahan, *agar gayung besambut*. Buah dari pelatihan dan sosialisasi tentu akan memberikan manfaat sehingga tidak sia-sia atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

Pembahasan

Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah merupakan kesepakatan yang harus dijalankan, karena kebijakan itu sendiri untuk menjawab permasalahan yang ada dan harus segera diselesaikan oleh lembaga yang berwenang. Begitu juga tentang kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini tentang kurikulum *Outcomes Based Education* (OBE). Terkesan belum siap mulai dari KKN, Kampus Merdeka dan sekarang kurikulum OBE yang hampir setiap lima tahun sekali mengalami perubahan dan perbaikan guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan publik.

Dekan selaku pucuk pimpinan di lingkungan Fakultas merasa sangat tertantang guna menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam sebuah penelitian dengan tema persepsi Dekan FKIP dalam menjalankan kebijakan publik tentang kurikulum OBE tersebut. Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada Dekan FKIP Universitas Labuhanbatu diperoleh informasi bahwa, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan tentang kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) menyebabkan terlambatnya penerapan di tingkat Program Studi. Dampak dari keterlambatan tentang sosialisasi dan pelatihan kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* (OBE) hal tersebut tergambar dari kurikulum Program Studi yang belum memasukkan dalam pembahasan Dosen di dalam proses belajar-mengajar di ruang kelas.

Hal tersebut juga tergambar dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) dosen yang belum ada dinarasikan. Tentunya pimpinan Fakultas sebagai pucuk pimpinan akan kesulitan ketika menekankan kepada ketua-ketua Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Labuhanbatu.

Sejatinya apa yang telah menjadi kesepakatan dan kebijakan pemerintah, harus segera dijalankan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Dari hasil wawancara dengan informan memberikan gambaran bahwa, apa yang sudah menjadi kesepakatan pemerintah dalam merubah atau

peningkatan mutu pendidikan melalui perubahan kurikulum tentunya mendapat *support* penuh dari Perguruan Tinggi. Dan kami yakin bahwa pandangan tentang kebijakan tersebut mempunyai persepsi yang sama dengan Dekan-Dekan yang lain. Persepsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya [3].

Dalam penelitian ini persepsi setiap pucuk pimpinan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda atas dikeluarkannya kebijakan kurikulum berbasis *Outcomes Based Education* tersebut. Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata [4].

Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain [5].

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya [6].

Setelah melakukan komunikasi dengan informan kunci tergambar bahwa, kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan mendapat kredit point yang tinggi dalam arti, Pimpinan Fakultas sangat siap untuk menjalankan lebih-lebih jika ada pendampingan dan pelatihan guna mengetahui arah dan tujuan yang dimaksud dalam kurikulum tersebut. Karena keputusan tentang kurikulum ini bisa dikatakan kebijakan, tentu banyak hal yang belum kami ketahui maksud dan tujuan. Mengutip dari Dyson tentang kebijakan beliau mengatakan bahwa mengambil sebuah keputusan itu memang rumit, sebagaimana dalam jurnal Buller mengatakan tentang Kumpulan artikel terakhir memberikan studi kasus mendalam tentang hubungan tersebut antara Eropaisasi dan politik dalam negeri di negara-negara anggota tertentu. Dyson mengeksplorasi bagaimana proses integrasi ini memengaruhi ekonomi Jerman kebijakan. Meskipun dimungkinkan untuk mengutip bukti yang menyatakan bahwa Eropaisasi itu menciptakan tekanan untuk konvergensi di sekitar praktik neo-liberal, Dyson jelas bahwa gambarnya jauh lebih kompleks dan *multi-faceted* [7].

Dari hasil wawancara kepada Dekan FKIP Labuhanbatu jelas bahwa, kebijakan apapun yang diberikan dari Pemerintah mau tidak mau harus dijalankan. Perguruan Tinggi yang sehat mempunyai keinginan yang kuat guna mensinergikan antara kebijakan pemerintah dengan instansi dibawahnya.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara mendalam terhadap subjek penelitian. Yakni Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu. Maka diperoleh hasil bahwa perlunya pendampingan ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar lapisan yang ada di daerah dapat mensinergikan apa yang sudah menjadi kebijakan tersebut. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan langsung atau melalui daring. Dengan adanya pelatihan tersebut, posisi Dekan akan lebih mudah ketika menginstruksikan kepada jajaran yang ada dibawahnya. Sehingga akan mudah terukur apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika belum maka pimpinan Fakultas akan memberikan evaluasi agar kebijakan yang telah dibuat kementerian pendidikan tersebut dapat berjalan.

Daftar Pustaka

- [1] Anjar, Agus, Kontribusi media sosial terhadap kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19, *Jurnal Education and Development* Jilid 9 No.2
- [2] Subkhi, Akhmad. 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka. Suhendi, Hendi. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- [3] Danim, Sudarwan. 2008. *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- [4] Rudi Shafaruddin, Arkanudin, Adi Suryadi. 2013. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Upt. Perpustakaan Universitas Tanjungpura*. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS*. 3-8.
- [5] Aprilke M. Loho, Ardjunius Tabaga, Syane Harinda. 2016. *Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas Pelayanan Referensi di Perpustakaan Universitas Negeri Manado*. *e-journal Acta Diuma*. Vol V. No. 1.
- [6] Mulyani, Rohanda. 2015. *Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan Referensi di UPT Perpustakaan UNPAD*. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. Vol 3. No 1.
- [7] Dani Elfia. 2010. *Persepsi Pemustaka Terhadap Pelayanan Library Corner Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.